

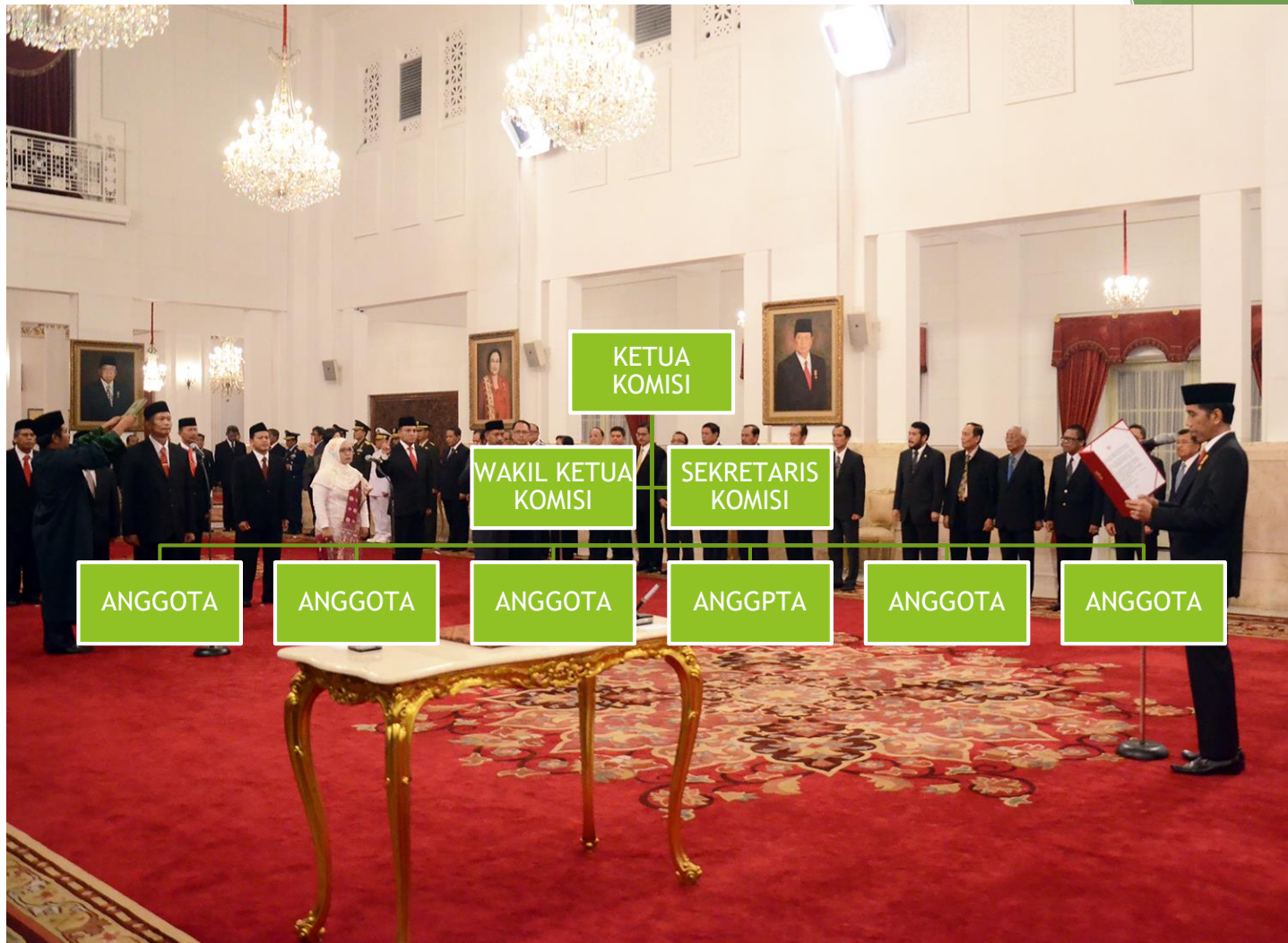


STRUKTUR KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DAN MEKANISME KERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh

Soemarno,

KETUA KOMISI KEJAKSAAN R.I.



*Pelantikan Anggota Komisi Kejaksaan
Periode 2015-2019 oleh Presiden Republik Indonesia*



Ketua : Sumarno, SH. MH.CFrA.
Wakil Ketua: Erna Ratnaningsih, SH.
LL.M.
Sekretaris :Ferdinand T. Andi Lolo,
SH. LL.M.

Anggota : Tudjo Pramono, SH. MH.
Dr. Barita LH. Simanjuntak, SH.
Ph.D, Yuswa Kusuma AB, SH. MM.
MH., Indro Sugianto, SH. MH.
Yuni Artha Manalu, SH. MH.
Pultoni, SH. MH.

KEPALA
SEKRETARAT

KEPALA BAGIAN
UMUM

— KEPALA SUBBAGIAN
KEUANGAN

— KEPALA SUBBAGIAN
TU, KEPEGAWAIAN
DAN RUMAH TANGGA

KEPALA BAGIAN
PELAYANAN
TEKNIS

— KPALA SUBBAGIAN
PENGADUAN MASYARAKAT
DAN PENDATAAN BAGIAN
PELAYANAN TEKNIS

— KEPALA SUBBAGIAN
EPALUASI DAN TINDAK
LANJUT BAGIAN
PELAYANAN TE

KEPALA BAGIAN
HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA

— KEPALA SUBBAGIAN
HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA DAN
MASYARAKAT

— KEPALA SUBBAGIAN
PENGUATAN LEMBAGA

POKJA
KETUA

POKJA
WAKIL

POKJA

POKJA

POKJA

POKJA

POKJA

POKJA

POKJA

Dasar Hukum Pembentukan

- ▶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- ▶ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.
- ▶ Nota Kesepemahaman Jaksa Agung Republik Indonesia dengan Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: Kep-099/AJA/05/2011 - NK-001/KK/05/2011 tentang Mekanisme Kerja antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan penilaian atas kinerja dan perilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan.



LAPORKAN PERILAKU & KINERJA JAKSA & PEGAWAI KEJAKSAAN

Ayo ambil andil memberantas ketidakbenaran bersama sama dan bantu tugas komisi kejaksaan 2015 dengan melaporkan segala bentuk penyimpangan perilaku serta kinerja kejaksaan di area anda.



Tugas dan kewenangan komisi kejaksaan 2015

- Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan atau pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan.
- Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan atau pegawai kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan.



Luasnya jangkauan pengawasan yang menjadi Tupoksi KKRI (\pm 24.000 orang Jaksa dan Pegawai TU, di seluruh tingkatan/ \pm 600 Satker)

Terbatasnya sumber daya manusia KKRI (9 orang komisioner, dan \pm 35 staf pendukung).
Anggaran 11 Miliar/pertahun



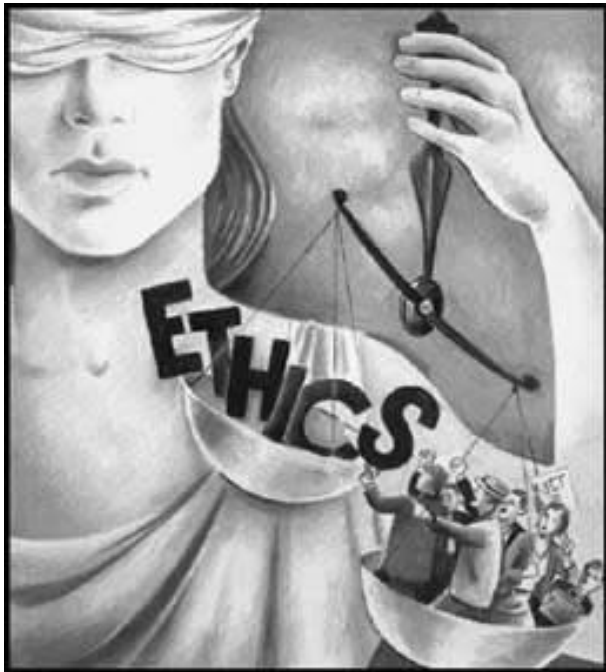
WEWENANG KKRI

(Pasal 3 dan Pasal 4 PERPRES- No. 18 /2011)

- ▶ Menerima laporan pengaduan masyarakat
- ▶ Meneruskan laporan pengaduan ke Jaksa Agung
- ▶ Melakukan Pemeriksaan ulang/tambahan
- ▶ Mengambil alih pemeriksaan
- ▶ Memanggil dan meminta keterangan Jaksa/Pegawai
- ▶ Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa
- ▶ Meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi atau anggota masyarakat.
- ▶ Memberikan penghargaan kepada Jaksa dan pegawai berprestasi.

KOMISI BERHAK

(Pasal 3 dan Pasal 4 PERPRES- No. 18 /2011)



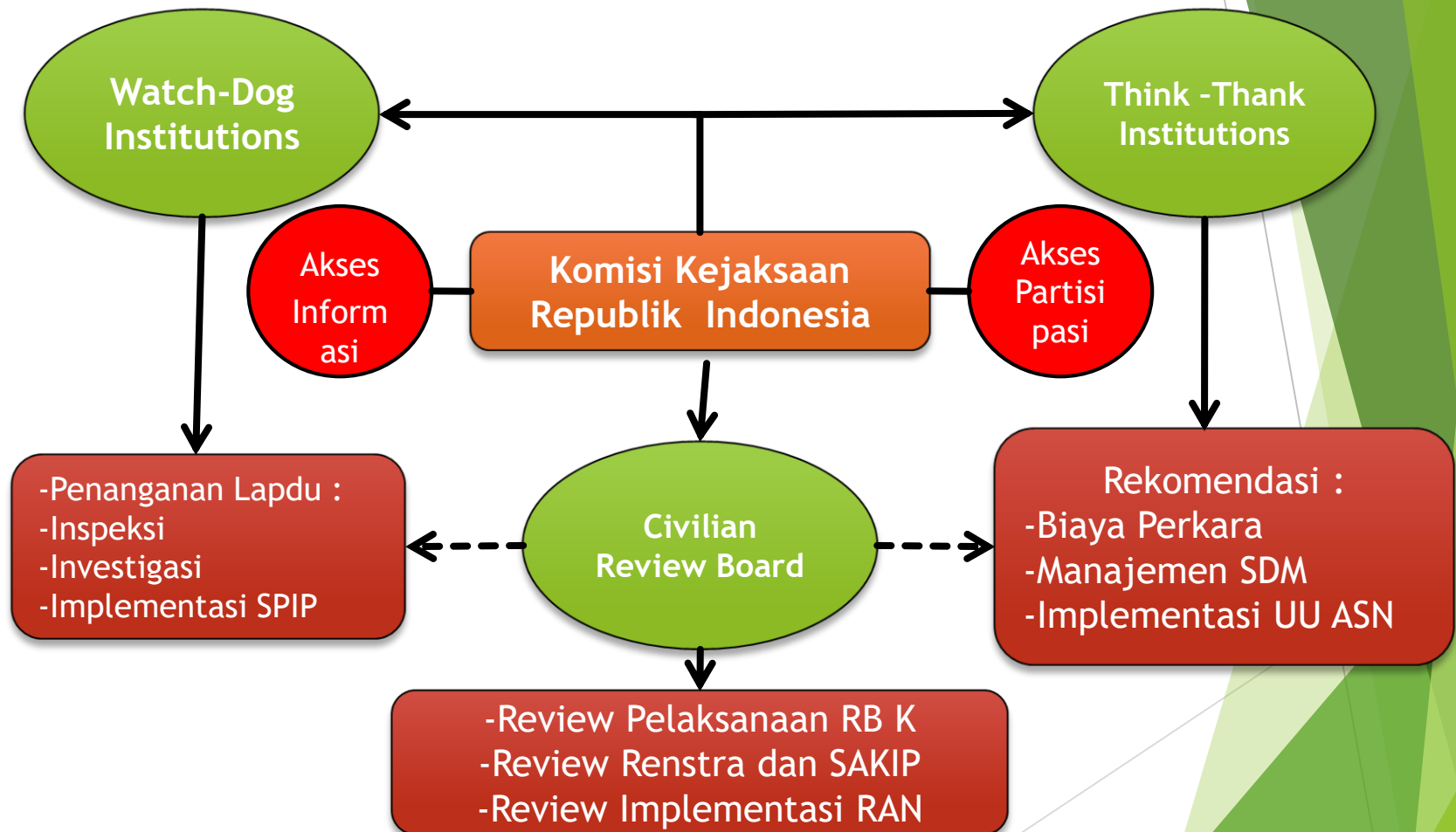
- ▶ Mengikuti gelar perkara terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian publik.
- ▶ Mengikuti gelar perkara terhadap kasus yang dilaporkan masyarakat ke KKRI.
- ▶ Diangkat menjadi Anggota Majelis Kode Perilaku Jaksa.

BENTUK REKOMENDASI KOMISI



- ▶ Penyempurnaan organisasi dan tata kerja serta peningkatan kinerja Kejaksaan.
- ▶ Pemberian penghargaan kepada Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan berprestasi.
- ▶ Pemberian Sanksi kepada Jaksa/Pegawai TU Kejaksaan

Skema Implementasi Kinerja Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

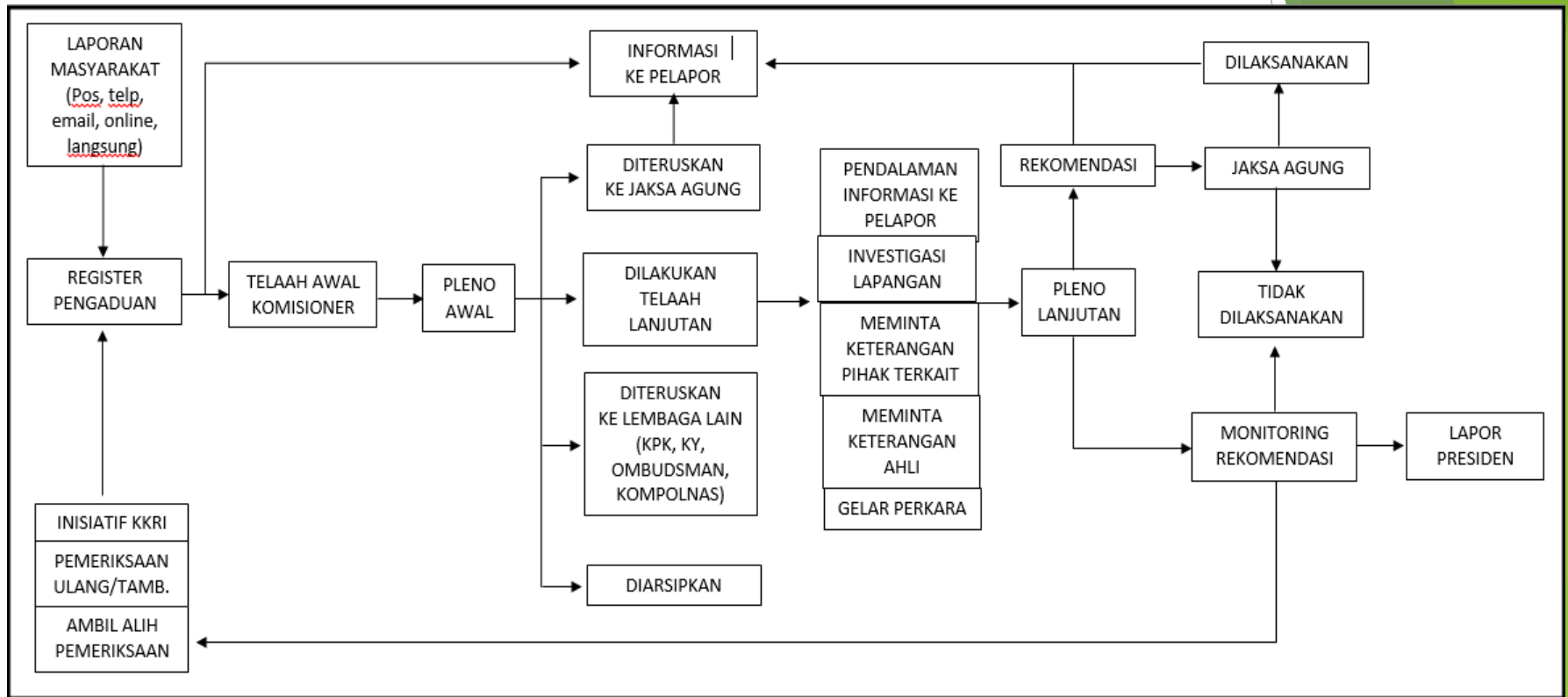


Status Laporan Pengaduan Masyarakat Tahun 2017

No.	Laporan Pengaduan	Jumlah	No.	Status Laporan Pengaduan	Jumlah	
1.	Sisa Lapdu Tahun 2016	176	1.	Diteruskan ke Jaksa Agung :		
2.	Lapdu Tahun 2017	878		a.	Untuk dilakukan klarifikasi.	259
				a.	Untuk Dilakukan Pemeriksaan	1
				a.	Untuk ditindaklanjuti segera	180
			2.	Diteruskan ke Instansi Lain :		
				a.	Komisi Kepolisian Nasional	29
				a.	Komisi Yudisial	6
				a.	KOMNAS HAM	2
				a.	SESEDEP MENKO POLHUKAM	1
				a.	Pelapor	6
			3.	Diarsipkan	309	
			4.	Dalam Proses konsep surat R	30	
			5.	Dalam Proses Telaah Komisioner	231	
Jumlah		1054	Jumlah		1054	

Laporan pengaduan tahun 2018 s/d Tanggal, 30 September 2018 serjumlah 664

Alur Penanganan Lapdu di KKRI



MEMBANGUN KEMITRAAN STRATEGIS

PROBLEM KELEMBAGAAN KKRI



ALIANSI STRATEGIS KOMISI KEJAKSAAN



KERJASAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI

- ▶ PENDIDIKAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL)
- ▶ PENELITIAN
- ▶ PENGABDIAN MASYARAKAT
(PEMANTAUAN KINERJA KEJAKSAAN)

Urgensi Revisi UU Kejaksaan

- ▶ Untuk menjawab permasalahan kedudukan dan kewenangan Kejaksaan dalam proses Penegakan Hukum dan Ketatanegaraan.
- ▶ Untuk menjawab permasalahan kedudukan dan kewenangan Komisi Kejaksaan.



Dukungan Penguatan KKRI

- ▶ Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap KKRI (tren peningkatan Laporan Pengaduan Masyarakat).
- ▶ Hasil RDPU KKRI dan Komisi III DPR RI yang mendukung penguatan KKRI melalui perubahan terhadap Undang-Undang Kejaksaan.
- ▶ Paket kebijakan bidang hukum yang dikeluarkan oleh Presiden, salah satunya menghendaki adanya penguatan terhadap institusi Komisi Kejaksaan.



Arah Penguatan Komisi Kejaksaan

- ▶ Pengaturan tentang Komisi Kejaksaan melalui undang-undang yang lebih memadai (Memuat kedudukan, kewenangan, dan keanggotaan Komisi Kejaksaan)
- ▶ Penegasan kewenangan Komisi, yang tidak hanya sebatas rekomendasi, tetapi juga sifat mengikatnya rekomendasi.
- ▶ Perlu dipertimbangkan agar Komisi Kejaksaan memiliki peran dalam proses mutasi dan promosi, dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemilihan dan pengangkatan Jaksa Agung.
- ▶ Penguatan Komisi Kejaksaan melalui jaminan kemandirian (aspek administrasi dan keuangan)

JAKSA

SYARAT JAKSA	INTEGRITAS
1. WNI	1. Dapat Dipercaya
2. Bertakwa Kepada Tuhan Yme	2. Komitmen
3. Setia Kepada Pancasila Dan Uud 1945	3. Tanggung Jawab
4. BERIJASAH PALING RENDAH Sarjana Hukum	4. Kejujuran
5. Berumur minimal 25 tahun	5. Kebenaran
6. Sehat Jasmani dan Rohani	6. Kesetiaan
7. Berwibawa	7. Disiplin
8. Jujur	8. Keteladanan
9. Berkelakuan Tidak Tercela	9. Kesederhanaan Hidup
10. Pegawai Negeri Sipil	10. Kode Etik Jaksa
	11. Kehormatan & Martabat
	12. Berkepribadian Menarik

Jujur Adil Kualitas Sabar Amanah



KOMISI KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

- HOME
- TENTANG KKRI
- PUBLIKASI
- BERITA
- KEGIATAN
- PENGADUAN
- CONTACT



WEBSTE KOMISI KEJAKSAAN

Pengaduan Online

Fieldset

Nama Lengkap *

Email *

No.Telp / Handphone *

Alamat *

Isi Laporan *

SISTEM PENGADUAN ONLINE
KOMISI KEJAKSAAN

Sekretariat :

KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Rambai No. 1A Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Telp. (021) 7264253, Fax. (021) 7265308

Website : www.komisi-kejaksaan.go.id



**Terima
kasih!**